



## **Analisis Praktik Good Corporate Governance Sebagai Upaya Peningkatan Kinerja Keuangan**

**Nesya Shabrina Riandini<sup>1</sup>, Allina Ramadhina<sup>2</sup>, Tri Wulandari<sup>3</sup>, Syahrul Falah<sup>4</sup>, Fitirianindita Rahayu Putri<sup>5</sup>, Reyhan Rizki Hutyanda<sup>6</sup>, Alya Azzahraa Jashilka<sup>7</sup>**

<sup>1,2,3,4,5,6,7</sup>Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Jakarta

E-mail: [nesyashab24@gmail.com](mailto:nesyashab24@gmail.com)<sup>1</sup>, [allinaaradhn01@gmail.com](mailto:allinaaradhn01@gmail.com)<sup>2</sup>, [triwulndrii@gmail.com](mailto:triwulndrii@gmail.com)<sup>3</sup>, [syahrullfalah74@gmail.com](mailto:syahrullfalah74@gmail.com)<sup>4</sup>, [fithriaanin@gmail.com](mailto:fithriaanin@gmail.com)<sup>5</sup>, [reyhannrizki@gmail.com](mailto:reyhannrizki@gmail.com)<sup>6</sup>, [ranggaea26@gmail.com](mailto:ranggaea26@gmail.com)<sup>7</sup>

### **Abstrak**

Pada penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pelaksanaan praktik *Good Corporate Governance* (GCG) di industri keuangan. Dalam hal ini permasalahan yang menjadi konsentrasi penelitian adalah mengenai aspek-aspek yang diperlukan dalam penerapan GCG, penerapan prinsip-prinsip GCG dalam kaitannya pada manajemen risiko keuangan, kebijakan yang digunakan dalam penyampaian informasi keuangan, sistem integritas dan etika dalam pengambilan keputusan, serta peran regulator dalam mengawasi dan menegakkan *Good Corporate Governance* dalam industri keuangan. Metode penulisan pada penelitian ini adalah menggunakan kajian studi pustaka melalui pengumpulan informasi dan data dari bermacam-macam studi literatur yang relevan terhadap topik penelitian. Analisis ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam mengenai bagaimana penerapan GCG di sektor keuangan, serta mencakup pada evaluasi terhadap implementasinya.

**Kata Kunci:** *Good Corporate Governance, sektor keuangan, transparansi*

### **Abstract**

This research aims to identify the implementation of good corporate governance (GCG) practices in the financial industry. In this case, the problems that are the focus of the research are the aspects required in implementation GCG, the application of GCG principles in relation to financial risk management, the policies used in conveying financial information, the integrity and ethics system in decision making, and the role of regulators, in supervising and enforcing GCG in the financial industry. The writing method for this research is to use a literature review by collecting information and data from various literature studies that are relevant to the research topic. This analysis is expected to provide an in-depth understanding of how GCG is implemented in the financial sector, as well as including an evaluation of its implementation.

**Keywords:** *Good Corporate Governance, Financial Sector, Transparency*

## PENDAHULUAN

Di Indonesia yang merasakan pentingnya *good corporate governance* sejak mengalami krisis yang dimana dengan adanya reformasi pada beberapa sektor yang ada di Indonesia. Pada saat yang bersamaan sektor ekonomi yang menjadi kunci dalam suatu negara menjadi lumpuh bahkan tidak berdaya dan untuk menggerakkannya Indonesia pada saat itu membutuhkan bantuan dana dari luar negeri dan munculah lembaga keuangan internasional atau IMF yang dapat memberikan bantuan dana sebagai persyaratan dengan meningkatkan tata kelola yang efektif atau *good governance* di Indonesia.

Prinsip *Good Corporate Governance* ini merupakan suatu seperangkat struktur yang mana dapat mengendalikan dan mengelola perusahaan supaya kegiatan operasionalnya berjalan sesuai dengan tujuan dan target dari kepentingan tersebut. GCG ini juga berperan sebagai bentuk mekanisme proses dan sistem dimana sistem organisasi suatu perusahaan bertujuan untuk menciptakan nilai tambah dengan jangka panjang dan berkelanjutan pada perusahaan dengan selalu mengamati dan memperhatikan kebutuhan *stakeholder* sesuai dengan hukum dan regulasi yang sedang berjalan.

Pada penelitian serta analisis tentang *good corporate governance* memerlukan beberapa yang harus dianalisis seperti aspek apa saja yang diperlukan pada industri keuangan sendiri apakah cukup hanya dengan menggunakan nilai akuntabilitas, pada implementasinya pun dalam *good corporate governance* yang ada di industri keuangan belum sepenuhnya berjalan dengan baik yang dimana prinsip yang tidak sesuai dengan harapannya. Seperti pada implementasi prinsip dalam manajemen risiko keuangannya yang dimana hal ini dapat mengurangi dalam potensi risiko yang nantinya akan dialami seperti pada kerugian yang dimana hal itu dapat diminimalisir dengan menjalankan prinsip yang ada di *good corporate governance*. Dapat dikatakan adanya *good corporate governance* dapat menjadi dukungan untuk mencegah terjadinya beberapa masalah yang ada di perusahaan tersebut.

Pada analisis yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui pengertian dan prinsip yang ada dalam praktik *Good Corporate Governance*, serta dalam hal ini penelitian ini menganalisis aspek yang diterapkan dalam GCG, implementasi prinsip pada industri keuangan serta kebijakan yang digunakan dalam penyampaian informasi kepada *stakeholder* yang diperlukan adapun penelitian ini mengevaluasi peran para regulator yang dimana untuk menegakkan GCG dalam industri keuangan itu sendiri.

## METODE

Penelitian ini mengacu pada kajian pustaka yang mana informasi dan data diperoleh dari berbagai sumber literatur, hal ini juga didapatkan dengan melakukan keterhubungan antara satu sama lain melalui data dari jurnal, buku dan lain-lain dengan menyesuaikan topik yang akan dianalisis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Aspek yang Ada Pada Industri Keuangan

#### a. Akuntabilitas

Pengimplementasian GCG ini erat kaitannya dengan sesuatu yang menunjukkan bentuk tanggung jawab terhadap pemangku kepentingan yang dalam hal ini melalui kebijakan atau pun mekanisme penyelenggaraan pelayanan publik yang dijalankan oleh aparat pemerintah. Di sisi lain, masalah kerap kali hadir terjadi dalam pengalokasian anggaran seperti rentan terjadinya kasus korupsi, kolusi, nepotisme. Tentu ini berpengaruh kepada penerapan akuntabilitas di pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah yang mana dalam

menjalankan pengelolaan keuangan. Prinsip ini juga melibatkan pelaporan hasil kinerja yang telah dicapai dan menjalankan kinerja utama dalam mendorong transparansi, integritas dan efisiensi. Dalam industri keuangan juga berkaitan dengan akuntabilitas keuangan, yaitu pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan dan aset perusahaan. Dalam industri keuangan, akuntabilitas juga berkaitan dengan akuntabilitas keuangan, yaitu pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan dan aset perusahaan.

b. Kepatuhan Hukum

Aspek kepatuhan hukum pada industri keuangan ini menjadi suatu yang penting untuk diawasi sebab dalam hal ini perlu pengelolaan risiko hukum dan kepatuhan harus guna mencegah dari adanya hal yang merugikan perusahaan Bank umum juga harus mematuhi regulasi Bank Indonesia (BI) mengenai alokasi fungsi dari kepatuhan Bank Umum. Kepatuhan hukum juga mencakup pada aspek GRC (*governance, risk management, and compliance*) adalah kerangka kerja untuk mengelola tata kelola, risiko, dan kepatuhan dalam sebuah perusahaan. Aspek kepatuhan hukum pada industri keuangan. Hal ini melibatkan pemahaman, implementasi, dan pemantauan terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan aktivitas keuangan suatu entitas, seperti bank, perusahaan asuransi, atau lembaga keuangan lainnya.

### Implementasi Prinsip GCG dalam Manajemen Risiko Keuangan

Salah satu tujuan dari pelaksanaan praktik GCG di seluruh sektor industri, terutama di sektor keuangan adalah untuk mengurangi kerentanan risiko yang dapat terjadi dan menangkalkan risiko yang dimaksud yaitu kerugian, hal ini dapat diminimalisir melalui implementasi prinsip-prinsip GCG. Perusahaan yang menerapkan prinsip GCG dianggap sudah mengelola aspek transparansi yang baik, serta hal ini dapat memberikan keuntungan bagi setiap entitas *stakeholder*. Kehadiran GCG diartikan sebagai jalan keluar dalam mewujudkan lingkungan bisnis yang mendukung dan mencegah terjadinya permasalahan yang kerap muncul di perusahaan. Dalam kaitannya dengan hal ini aspek lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan dinamis dan kompleks di lini bisnis, maka daripada itu GCG menjadi suatu keharusan dalam memaksimalkan keberlangsungan jangka panjang, dan mesti diimplementasikan untuk mekanisme usaha pada saat ini. Bentuk prinsip *Good Corporate Governance* yang harus dijalankan adalah meliputi:

a. Transparansi

Transparansi merujuk pada pengungkapan informasi perusahaan, termasuk aspek waktu, ketepatan, dan efisiensi saat proses *decision making*, kualitas, standarisasi, anggaran dan keadilan tersebut dioperasikan. Dalam meningkatkan kinerja perusahaan, prinsip ini mengatur pengembangan teknologi informasi strukturisasi guna menilai kinerja secara optimal, memastikan proses *decision making* yang dilakukan oleh komisaris dan manajemen berjalan efektif, serta mengelola risiko perusahaan pada tingkat toleransi yang dapat diterima untuk memenuhi kinerja perusahaan secara keseluruhan.

b. Akuntabilitas

Akuntabilitas melibatkan pembentukan efektivitas sistem pemantauan melalui pembagian kewenangan antara direksi, dewan komisaris, *stakeholder* dan auditor dalam melaksanakan bentuk pertanggungjawaban kinerja dan *traceable* secara rasional. Prinsip ini mengatur pembentukan sebagai upaya memaksimalkan internalisasi pengawasan yang dilakukan oleh komisaris melalui komite audit. Internal auditor ini memainkan peran kunci dalam meningkatkan kinerja perusahaan dengan memberikan masukan kepada manajemen tentang kesalahan dan kekurangan dari periode sebelumnya untuk diperbaiki di masa depan. Prinsip ini juga mengatur audit yang sehat dan independen, serta melakukan penetapan bentuk penilaian kinerja melalui informasi yang akurat dan akuntansi.

c. Responsibilitas

Aspek GCG ini memiliki pemahaman mengenai operasional perusahaan yang harus memenuhi tanggung jawabnya sebagai entitas bisnis dalam masyarakat, terutama pada para pemangku kepentingannya untuk menciptakan citra perusahaan sebagai warga korporasi yang baik. Dengan mengikuti prinsip ini, perusahaan akan bertindak profesional dan beretika dalam menjalankan usahanya, mencegah organ internal menyalahgunakan kekuasaan, dan menciptakan lingkungan bisnis yang sehat, termasuk mencegah praktik persaingan kotor atau monopoli.

d. Independensi

Independensi berarti bahwa perusahaan berada dalam keadaan yang tidak terikat dengan pengaruh dari pihak tertentu atau memiliki aspek manajemen yang dapat dipercaya. Perusahaan juga diharapkan memiliki kebijakan internal yang sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku. Penerapan prinsip ini sangat penting agar perusahaan tidak mudah dipengaruhi atau diintervensi oleh pihak internal atau eksternal yang tidak berkaitan dengan regulasi yang relevan dalam mekanisme korporasi yang sehat. Hal ini bertujuan agar perusahaan dapat menghindari berbagai masalah dan konflik kepentingan antara perusahaan dan direksi yang dapat merusak *values* perusahaan, sehingga segala operasional bisnis berlangsung dengan efisien dan stabil.

c. Kewajaran

Kewajaran adalah perlakuan yang adil dari perusahaan kepada semua entitas kepentingan setara dengan ketentuan yang dibutuhkan. Penting untuk memastikan bahwa pihak-pihak yang memiliki kepentingan terlindungi dari kecurangan dan penyalahgunaan wewenang oleh pihak internal. Maka sebab itu, tanggung jawab dan kinerja komisaris dan manajemen sangat dibutuhkan.

Dengan menerapkan GCG, perusahaan dapat memperoleh keuntungan besar, termasuk mendapatkan kepercayaan dari para investor. Perusahaan yang mengimplementasikan GCG akan lebih dipercayai oleh kreditur dan investor, sehingga ini akan meningkatkan likuid saham dan harga yang meningkat.

Otoritas Jasa Keuangan memiliki peran penting dalam mengawasi dan menegakkan *Good Corporate Governance* (GCG), diantaranya:

- a. Pembuatan Kebijakan: Peran Regulator (Otoritas Jasa Keuangan) dalam mengawasi GCG di bidang industri keuangan yaitu merumuskan kebijakan dan pedoman GCG untuk memastikan bahwa industri keuangan beroperasi dengan prinsip-prinsip yang sudah semestinya diatur dan tertera serta tata kelola yang baik.
- b. Pengawasan Pelaksanaan GCG: Peran Regulator (Otoritas Jasa Keuangan) bertugas mengawasi implementasi praktik GCG oleh industri keuangan. Ini melibatkan sebuah evaluasi dalam proses pengambilan keputusan, transparansi, dan akuntabilitas terhadap pelaksanaan GCG di industri keuangan tersebut.
- c. Pemberian Sanksi: Peran Regulator (Otoritas Jasa Keuangan) dalam mengawasi GCG di industri keuangan ini melakukan pemberian sanksi, maka jika ditemukan pelanggaran GCG terhadap industri keuangan tersebut, regulator memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi, yang dapat mencakup denda, pembatasan operasional, atau tindakan hukum sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.
- d. Peningkatan Kesadaran: Peran Regulator (Otoritas Jasa keuangan) berperan dalam meningkatkan kesadaran lembaga keuangan terhadap pentingnya GCG melalui pedoman, pelatihan, dan komunikasi yang terus-menerus untuk meningkatkan kinerja para pegawai di industri keuangan.
- e. Peningkatan Kesadaran: Peran Regulator (Otoritas Jasa Keuangan) berperan dalam

meningkatkan kesadaran lembaga keuangan terhadap pentingnya GCG melalui pedoman, pelatihan para pegawai, dan komunikasi yang terus-menerus.

- f. Pendidikan dan Penyuluhan: Peran Regulator sangat berperan dalam memberikan edukasi dan penyuluhan kepada entitas keuangan tentang pentingnya dan implementasi praktik GCG yang baik, karena jika sudah mengimplementasikan praktik GCG yang baik, maka akan tercipta peningkatan kinerja pegawai industri keuangan.

### **Kebijakan yang Digunakan untuk Penyampaian Informasi dalam Industri Keuangan**

Kebijakan yang digunakan untuk penyampaian informasi dalam industri keuangan mencakup aspek keamanan, efisiensi biaya, dan kualitas informasi. SIK atau yang dipahami sebagai Sistem Informasi Keuangan merupakan sistem penerapan keamanan yang ketat, dalam hal ini seperti penerapan kontrolisasi akses, data enkripsi, serta perlindungan dari bahaya peretas atau bahaya *malware*. Di sisi lain, SIK ini juga mesti diterapkan dengan biaya yang efektif dengan melibatkan penerapan sumber daya dan meminimalisir anggaran dalam proses penyimpanan data keuangan. Kemudian, dalam menyampaikan SIK harus menekankan pada ketentuan tertentu seperti kevalidan data, informasi dapat dipercaya, material, bebas dari bias, konsisten, substansial dan mudah dipahami. Akuntansi (SIA) juga memiliki tujuan yang sama, yaitu menafsirkan dan mempermudah pengelolaan melalui pengolahan dan pelaporan data anggaran di suatu perusahaan. Keamanan data, analisis kinerja keuangan, dan integrasi sistem merupakan bagian dari fungsi dan tujuan SIA. Dengan demikian, kebijakan untuk penyampaian informasi dalam industri keuangan mencakup aspek keamanan, efisiensi biaya, dan kualitas informasi, yang diatur melalui implementasi Sistem Informasi Keuangan dan Sistem Informasi Akuntansi.

Sistem Informasi Keuangan (SIK) membantu perusahaan dalam berbagai aspek, termasuk pengumpulan, analisis, dan manajemen mengenai data anggaran yang dibutuhkan dalam melakukan pengambilan keputusan yang efektif. SIK dalam hal ini juga mempermudah dalam memenuhi kebutuhan terkait laporan anggaran perusahaan untuk manajer dan elemen-elemen lain dalam korporasi. Berikut merupakan fungsi dan manfaat SIK, yaitu:

- a. Pengumpulan dan Analisis Informasi: Sistem Informasi Keuangan ini berperan dalam melakukan analisa dan pengumpulan data keuangan yang dibutuhkan dalam *decision making*.
- b. Pemantauan Aset dan Hutang: Sistem Informasi Keuangan diselenggarakan sebagai usaha dalam melakukan pemantauan kestabilan aset dan hutang korporasi, serta berperan dalam melaksanakan pengelolaan data akan aset yang dimiliki oleh perusahaan.
- c. Membantu Operasional Perusahaan: SIK memainkan peran penting dalam manajemen keuangan modern, membantu dalam mengelola dan mengontrol keuangan perusahaan.

Oleh karena itu, Sistem Informasi Keuangan membantu perusahaan dalam pengelolaan informasi keuangan, pengambilan keputusan, pemantauan aset dan hutang, serta penyajian laporan keuangan kepada pimpinan perusahaan.

### **Integritas dan Etika Yang Diperlukan Untuk Pengambilan Keputusan**

Dalam jurnal *Integrity: What it is and Why it is Important*, L. W. J. C. Huberts (2018) membahas pentingnya integritas dalam pengambilan keputusan di sektor publik. Huberts berpendapat bahwa integritas adalah kunci untuk memastikan bahwa keputusan yang dibuat oleh pejabat publik adalah keputusan yang benar, adil, dan berkelanjutan. Mendefinisikan integritas sebagai "kesesuaian antara nilai-nilai, prinsip-prinsip, dan tindakan seseorang." Dalam konteks pengambilan keputusan di sektor publik, integritas berarti bahwa pejabat publik membuat keputusan yang kompeten sesuai dengan *values* dan aspek-aspek moral yang berkaitan. Integritas penting dalam pengambilan keputusan di sektor publik karena memiliki beberapa manfaat, yaitu:

- a. Meningkatkan kepercayaan publik Ketika pejabat publik bertindak dengan integritas, masyarakat lebih percaya jika keberhasilan tersebut diperoleh dari ketepatan dalam

pengambilan keputusan. Hal ini dapat meningkatkan dukungan publik terhadap pemerintah dan mengurangi korupsi.

- b. Meningkatkan kualitas keputusan dapat membantu pejabat publik membuat keputusan yang lebih adil, bijaksana, dan berkelanjutan.
- c. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas dapat membantu pejabat publik menghindari konflik kepentingan dan menjaga sumber daya publik diterapkan secara efektif dan efisien.

Beberapa tantangan yang dapat menghambat integritas dalam pengambilan keputusan di sektor publik, yaitu:

- a. Tekanan untuk mementingkan kepentingan pribadi atau kelompok Pejabat publik sering dihadapkan pada tekanan untuk membuat keputusan yang menguntungkan kepentingan pribadi atau kelompoknya.
- a. Kurang transparansi dan akuntabilitas Ketika pengambilan keputusan tidak transparan dan akuntabel, pejabat publik lebih mudah untuk bertindak tidak etis.
- b. Kurang budaya integritas Ketika budaya integritas tidak kuat, pejabat publik lebih mungkin untuk mengabaikan nilai-nilai dan prinsip-prinsip moral mereka.

Etika memegang peran kunci dalam memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh pejabat publik sesuai dengan prinsip-prinsip moral yang mereka anut. Etika, yang didefinisikan sebagai "prinsip-prinsip moral yang mengatur perilaku manusia," memiliki dampak positif yang signifikan dalam konteks pengambilan keputusan di sektor publik. Beberapa manfaatnya melibatkan peningkatan kepercayaan publik, peningkatan kualitas keputusan, dan peningkatan efisiensi dan efektivitas. Meningkatnya kepercayaan publik terjadi ketika pejabat publik bertindak secara etis, memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa keputusan yang diambil adalah yang terbaik. Ini tidak hanya dapat meningkatkan dukungan publik terhadap pemerintah, tetapi juga membantu mengurangi tingkat korupsi. Etika juga berkontribusi pada peningkatan kualitas keputusan, memastikan bahwa keputusan yang diambil lebih adil, bijaksana, dan berkelanjutan. Selain itu, penerapan etika dapat memaksimalkan efisiensi dalam penggunaan sumber daya publik.

Meskipun etika memiliki peran yang penting, ada beberapa tantangan yang dapat menghambat implementasinya dalam pengambilan keputusan di sektor publik. Tantangan tersebut termasuk tekanan untuk mementingkan kepentingan pribadi atau kelompok kurangnya transparansi dan akuntabilitas, serta kurangnya budaya etika. Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, beberapa langkah dapat diambil. Langkah-langkah tersebut melibatkan pengembangan kode etik dan pedoman perilaku, peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan, serta pembangunan budaya etika di semua tingkat organisasi pemerintah. Secara keseluruhan, etika adalah kualitas yang esensial bagi pejabat publik. Dengan bertindak secara etis, pejabat publik dapat mengontrol pemerintah mengoperasikannya secara efektif dan masyarakat dapat memiliki kepercayaan bahwa keputusan yang diambil adalah yang tepat.

Beberapa contoh konkret penerapan etika dalam pengambilan keputusan di sektor publik melibatkan prioritas pada kepentingan publik daripada kepentingan pribadi atau kelompok, keputusan yang adil dan tidak diskriminatif, serta transparansi dalam proses pengambilan keputusan dengan memberikan informasi kepada publik tentang alasan di balik keputusan tersebut. Dengan menerapkan etika secara konsisten, kita dapat berkontribusi pada pembentukan masyarakat yang lebih adil, sejahtera, dan demokratis.

Integritas dan etika memainkan peran kunci dalam pengambilan keputusan di sektor publik, pentingnya integritas sebagai faktor utama dalam menjamin keputusan yang diperoleh oleh aparat publik merupakan hasil yang adil, berkelanjutan dan benar. Integritas dapat meningkatkan

kepercayaan publik, kualitas keputusan, serta efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya publik. Beberapa tantangan yang mungkin menghambat integritas melibatkan tekanan untuk memprioritaskan kepentingan pribadi atau kelompok, kurangnya transparansi, akuntabilitas, dan budaya integritas yang lemah. Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan langkah-langkah seperti pengembangan kode etik, peningkatan transparansi, dan pembangunan budaya integritas. Dengan menerapkan integritas dan etika secara konsisten, pejabat publik dapat memastikan bahwa keputusan yang diambil mengutamakan kepentingan publik, adil, dan transparan. Hal ini tidak hanya dapat membantu membangun kepercayaan publik, tetapi juga berkontribusi pada pembentukan masyarakat yang lebih adil, sejahtera, dan demokratis.

## KESIMPULAN

Untuk menjalankan bisnis dengan baik, kehadiran manajemen perusahaan yang efektif merupakan suatu keperluan dan *Good Corporate Governance* adalah solusi yang tepat. *Good Corporate Governance* kini menjadi pusat perhatian dalam dunia bisnis, tidak hanya sebagai kewajiban bagi suatu perusahaan, tetapi juga sebagai suatu keharusan untuk memastikan efisiensi operasional dan pertumbuhan ekonomi yang *sustainable* terhadap *shareholder* dan setiap elemen masyarakat.

GCG ini menjadi suatu prinsip-prinsip yang penerapannya dilakukan oleh suatu perusahaan dalam menguatkan nilai perusahaan, memaksimalkan kinerja dan kontribusi korporasi, serta mencakup pada keberlangsungan perusahaan dalam jangka panjang.

Dalam menerapkan *Good Corporate Governance* perlu memperhatikan aspek-aspek seperti akuntabilitas, transparansi, serta kedisiplinan hukum yang sedang berjalan

Dengan menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG), perusahaan dapat memperoleh keuntungan besar, termasuk mendapatkan kepercayaan dari para investor. Korporasi yang menerapkan GCG ini akan lebih mendapatkan kepercayaan dari kreditur dan investor, sehingga sahamnya akan mengalami likuid dan harga jual akan meningkat.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Bapak Muhammad Khoiril Anwar S.sos, M.si., selaku dosen pengampu mata kuliah Birokrasi dan Governance Publik, yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan penelitian ini. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada rekan-rekan kelompok yang telah berkolaborasi dengan baik dalam proses penyusunan penelitian ini. Selain itu, penghargaan yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada para peneliti terdahulu yang telah mempublikasikan karya-karya mereka dan mengizinkan karya tersebut digunakan sebagai pedoman serta referensi dalam penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Erstiawan, M. ., & Soebijino, T. (2018). Analisis Good Corporate Governance Pada Koperasi (Pendekatan Sistem Informasi Studi Kasus Koperasi Setia Bhakti Wanita Di Surabaya. *Develop*, 2(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.25139/dev.v2i1.959>
- Rizki, D. A., & E, W. (2021). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI Tahun 2014-2018. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 10(3), 290. <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/EJMUNUD.2021.v10.i03.p05>
- Sari, M., Hanum, S., & Rahmayati, R. (2022). Analisis Manajemen Risiko Dalam Penerapan Good Corporate Governance: Studi Pada Perusahaan Perbankan Di Indoneisa. *Owner*, 6(2), 1540–1554. <https://doi.org/https://doi.org/10.33395/owner.v6i2.804>
- Titania, H., & Taqwa, S. (2023). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 5(3), 1224–1238.

- Wardoyo Urip, D., Rahmadani, R., & Tri Hanggoro, P. (2021). Good Corporate Governance Dalam Perspektif Teori Keagenan. *EKOMA: Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi*, 1(1), 39–43. <https://doi.org/https://doi.org/10.56799/ekoma.v1i1.25>
- Yustianti, S. (2017). Kewenangan Pengaturan dan Pengawasan Perbankan Oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 1(1).